

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia. Sensus Penduduk Tahun 2023 menyatakan jumlah penduduk Indonesia sebesar 280 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk tersebut tentunya harus di kendalikan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kelahiran adalah dengan melaksanakan program keluarga berencana. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat. Salah satu kegiatan program ini adalah memberikan pelayanan kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dapat menunda ataupun mencegah terjadinya kehamilan (BKKBN, 2022).

Pengendalian pertumbuhan penduduk masih menjadi salah satu tantangan utama di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka kelahiran di Indonesia masih relatif tinggi *Total Fertility Rate* (TFR) di Indonesia 2,14 anak per wanita. BKKBN juga mencatat bahwa sekitar 10.000 bayi lahir setiap hari atau sekitar 4 juta per tahun, sehingga dapat memengaruhi kualitas pembangunan sumber daya manusia (Sulastri, Kania and Widaningsih, 2025).

Menurut hasil pemuktahiran pendataan keluarga tahun 2023 oleh BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS (Pasangan Usia Subur) peserta KB (Keluarga Berencana) di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 60,4%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB di Provinsi Jawa Barat sebesar 63,2%. Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 35,3%, diikuti pil sebesar 13,2%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu implan sebesar 10,5%, IUD/AKDR sebesar 8,9%, Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 4,1%, Metode Operasi Pria (MOP) sebesar 0,2% (Astuti, Kartika and Purnama Sari, 2025).

Berdasarkan data dari profil kesehatan kota Cirebon tahun 2023 peserta KB aktif 256.835 orang, yang terdiri dari pengguna kontrasepsi kondom 12.347 orang (4,81%), suntik sebanyak 125.577 orang (48,89%), pil sebanyak 52.759 orang (20,54%), AKDR sebanyak 40.638 orang (15,82%), MOP sebanyak 1.166 orang (0,45%), MOW sebanyak 6.488 orang (2,43%), implan sebanyak 17.037 orang (6,63%), dan MAL sebanyak 823 orang (0,32%) (Cirebon, 2023).

Berdasarkan data rekam medis RSD Gunung jati Kota Cirebon di ruangan bersalin pengguna alat kontrasepsi intra uterine device (IUD) pada ibu pasca salin atau nifas pada tahun 2024 sebanyak 230 akseptor dari 559 total persalinan dan tahun 2025 sebanyak 265 akseptor dari total 383 persalinan.

yang berarti penggunaannya masih berfluktuasi dan belum meningkat secara konsisten.

Rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dibandingkan metode kontrasepsi jangka pendek menunjukkan bahwa pemilihan kontrasepsi yang efektif dan berkelanjutan masih menjadi tantangan dalam program Keluarga Berencana. Padahal, MKJP merupakan metode yang memiliki efektivitas tinggi, tingkat kegagalan yang rendah, serta dapat digunakan dalam jangka waktu lama tanpa memerlukan kepatuhan penggunaan secara rutin. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan MKJP menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung keberhasilan program KB dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP, jarak kehamilan dapat diatur. Pengaturan jarak kelahiran ini dapat mengurangi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat berpotensi menjadi *stunting*, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi, sekaligus menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia dan solusi 4T yang menjadi penyebab AKI (BKKBN, 2022).

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) saat ini difokuskan pada pemasangan segera pasca persalinan (*immediate postpartum contraception*) sebagai bagian yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu. Pemasangan dapat dilakukan segera setelah plasenta lahir, dalam 48 jam post partum, maupun sebelum ibu pulang dari fasilitas kesehatan sehingga lebih efektif karena tidak bergantung

pada kunjungan ulang yang berisiko terlewat. Optimalisasi KB pasca salin terbukti menjadi strategi yang tepat dan dinilai efektif dalam meningkatkan cakupan MKJP serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan (Wulandari, 2022).

Pelaksanaan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pasca salin di rumah sakit diawali dengan konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan pendekatan komunikasi efektif, mencakup penjelasan mengenai pilihan metode MKJP (IUD dan MOW), mekanisme kerja, efektivitas, keuntungan, efek samping, kontraindikasi, serta waktu pemasangan yang aman setelah persalinan. Ibu juga diberikan kesempatan berdiskusi bersama suami atau keluarga agar pengambilan keputusan bersifat sukarela dan berdasarkan informasi (*informed choice*). Setelah ibu menyatakan persetujuan melalui *informed consent*, tenaga kesehatan melakukan skrining medis dan memastikan kondisi ibu stabil. Seluruh prosedur dilaksanakan dengan prinsip pencegahan infeksi, teknik yang sesuai standar, serta diakhiri dengan edukasi tanda bahaya, jadwal kontrol, dan kemungkinan efek samping, sehingga kesinambungan penggunaan kontrasepsi dapat terjaga secara optimal.

Adapun penelitian terkait pengambilan keputusan pemilihan metode kontrasepsi yang dilakukan Aris menunjukkan bahwa konseling yang baik dapat meningkatkan keyakinan responden untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang (Prastyoningsih, 2025).

Konseling KB adalah proses komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan klien. Tujuan utama program konseling yaitu untuk membantu

individu atau pasangan agar mampu membuat keputusan dengan tepat, sadar, dan bertanggung jawab terkait perencanaan kontrasepsi (Rahmah, Chica Heryani and Info, 2024).

Berjalannya konseling mungkin akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan MKJP. Hal ini dikarenakan, kurangnya pengetahuan dapat meningkatkan opini negatif masyarakat terhadap MKJP. Hal tersebut berdampak bagi masyarakat yang mungkin pada awalnya memiliki sikap positif, kemudian akan menjadi ragu untuk memakai MKJP. Sementara itu, jika pengetahuan masyarakat cukup memadai, hal ini dapat meningkatkan opini maupun sikap calon pengguna untuk menjadi pengguna aktif MKJP (Rahmah, Chica Heryani and Info, 2024).

Adapun penelitian Elizawardah menyebutkan bahwa konseling yang efektif dapat membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta motivasi masyarakat, khususnya pasangan usia subur, khususnya dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang tepat dan sesuai dengan kondisi mereka. Petugas kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas konseling tentang alat kontrasepsi. (Elizawardah, 2025)

Berdasarkan data pemeriksaan Kehamilan di Ruang Bersalin RSD Gunung Jati dari Bulan (Oktober - Desember 2025) terdapat ibu hamil dengan jumlah 179 pasien, yang akan direncanakan SC dan persalinan induksi (53 sudah

memutuskan KB IUD, 22 memutuskan KB MOW, 4 memutuskan KB Suntik sedangkan 100 pasien masih belum bisa memutuskan KB).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin mengetahui “ Hubungan Pelaksanaan Konseling Alat Kontrasepsi MKJP dengan Pemilihan Pengambilan Keputusan Berkontrasepsi di Ruang Bersalin RS D Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2026”.

B. Perumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan pelaksanaan konseling alat kontrasepsi MKJP dengan pengambilan keputusan berkontrasepsi pada ibu post partum?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pelaksanaan konseling KB dengan pengambilan keputusan penggunaan KB MKJP (IUD, MOW) pada ibu hamil yang akan bersalin

2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan karakteristik akseptor KB MKJP (Paritas, Metode Persalinan) di RSD Gunung Jati Kota Cirebon
- b. Menggambarkan karakteristik pemberi konseling KB MKJP di RSD Gunung Jati Kota Cirebon
- c. Menggambarkan hubungan konseling KB terhadap pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi KB MKJP

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah kajian ilmiah tentang konseling KB dan penggunaan MKJP pada ibu hamil resti, khususnya dengan indikasi Pre Sectio Caesarea.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi tenaga kesehatan

Sebagai dasar pengambilan kebijakan program KB berkelanjutan, serta bagi rumah sakit sebagai masukan dalam menyusun strategi kesehatan untuk menanggulangi masalah KB pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pengembangan SDM.

2. Bagi masyarakat: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam memilih serta mau menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yang aman dan dapat diterima di masyarakat hingga pada akhirnya dapat digunakan dengan tepat.

3. Bagi peneliti selanjutnya: sebagai referensi penelitian terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang hubungan pelaksanaan konseling alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan pengambilan keputusan berkontrasepsi. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang akan bersalin atau ibu postpartum yang mendapatkan konseling KB MKJP serta tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang memberikan konseling. Penelitian dilaksanakan di Ruang Bersalin RSD Gunung Jati Kota Cirebon

pada tahun 2026. Penelitian ini dilakukan karena penggunaan MKJP masih lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi jangka pendek, serta masih terdapat ibu yang belum dapat menentukan pilihan kontrasepsi setelah persalinan sehingga diperlukan upaya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan konseling terhadap pengambilan keputusan berkontrasepsi. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan konseling KB MKJP yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan menganalisis hubungannya dengan keputusan ibu dalam memilih metode kontrasepsi menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif analitik.